

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Aktor *Intermediary*

Pembahasan mengenai aktor *intermediary* di Indonesia akhir-akhir ini sudah banyak berkembang. *Intermediary*, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penghubung atau penengah. Maka dari itu, aktor *intermediary* hadir dan telah berkembang aktor-aktor *intermediary* yang memposisikan dirinya sebagai jembatan yang menghubungkan negara dengan masyarakat. Hal itu dimaksud dalam hal dilihat dari peran mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sering kali sulit untuk dijangkau oleh negara.

Palgrave Macmillan dalam (Muslihat debby, 2016:11) *Intermediary Ways* (saluran *intermediary*) dikenal sebagai representasi dan mediator antara *demos* (publik) dengan *public affairs*. Aktor-aktor dalam saluran *intermediary* antara lain kelompok masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan tokoh-tokoh pemimpin informal.

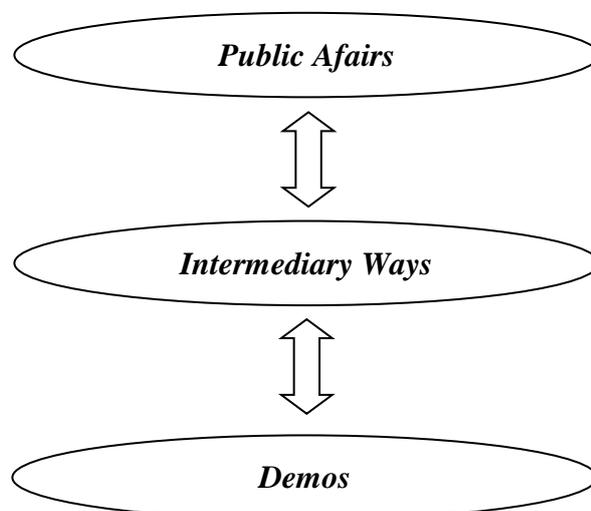
Dalam hal ini masyarakat sipil bisa menjadi perantara (*intermediary*) sehingga tidak berada dalam *demos* seperti yang terjadi dalam diskursus dominan. Ketika aktor *intermediary* menciptakan suatu sistem karena adanya suatu keinginan untuk menciptakan sistem yang baru dan mampu merubah hal yang rusak menjadi baik atau memperbaiki.

Biasanya para masyarakat sipil yang menjadi aktivis demokrasi akan sangat sulit untuk menjalin koneksi dengan partai atau yang sering disebut dengan aktor politik. Karena jika adanya relasi yang sehat antara masyarakat dengan partai politik akan menimbulkan suatu kebanggaan di dalam ranah demokrasi yang prospektif.

Palgrave Macmillan dalam (<http://politik.lipi.go.id>) *public affairs* adalah kepentingan publik serta pelayanan kesehatan yang terjangkau, biaya Pendidikan yang murah namun bermutu atau pemenuhan rasa aman dari instrument koerif negara yang professional, sedangkan *intermediary ways* seperti yang tadi di paragraf atas sudah dijelaskan yaitu untuk menjalin koneksi antara kelompok masyarakat sipil (para aktivis demokrasi) dengan partai politik (aktor politik) sehingga tidak hanya berada dalam jalur *domain demos*.

Representasi politik mempunyai 3 skema yaitu demos, kepentingan publik, dan aktor perantara yang berfungsi memfasilitasi kontrol publik.

Gambar 2.1
Skema Representasi Politik



Dalam perkembangan politik kontemporer, berbagai langkah telah dilakukan oleh aktor *intermediary* dalam peran dan fungsinya sebagai *state-society relation*. Dalam ranah non-elektoral, biasanya wadah yang digunakan berbentuk NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan atas dasar tujuan tertentu.

Hadirnya LSM di tengah-tengah masyarakat merupakan hal yang sudah tidak dapat dinafikan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemerintah atau negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara menyeluruh, dan atau keterbatasan masyarakat dalam memenuhi tuntutan mereka kepada negara. Sehingga pada akhirnya peran tersebut diambil alih oleh para aktor *intermediary* dalam menjembatani antara masyarakat dengan negara.

2. Civil Society

a. Pengertian Civil Society

Civil Society merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Dalam (Hadiwijoyo, 2012:73) *Civil society* sering disebut masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah *civil society*, berasal dari bahasa latin, yaitu *civitas dei*, atau Kota Ilahi. Asal kata *civil* adalah *civilization* (beradab). *Civil society* secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Menurut Hikam dalam (Hadiwijoyo, 2012:74) mengartikan bahwa *civil society* adalah kenyataan dari kehidupan sosial yang terorganisasi yang bersifat sukarela,

swadaya, swasembada, dan terbatas dari tekanan negara, yang terikat oleh hukum yang berlaku.

Adapun menurut Eisenstadt (Gaffar, 2006:180) *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara. Jadi, *civil society* adalah sebuah masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. Menurut Eisenstadt, masyarakat tersebut bukanlah masyarakat yang mudah kita artikan. Tetapi masyarakat yang mempunyai komponen tertentu sebagai syarat adanya *civil society* itu.

Seringkali organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat sipil adalah NGOs (*Non Government Organizations/ Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM*) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional seperti kelompok kritis independen, kaum bisnis, maupun media merupakan bagian dari *civil society*. Oleh karena itu, menurut Hikam (Hadiwijoyo, 2012,82) kelompok ini dapat disebut pula sebagai kelas menengah yang pro demokrasi.

Dalam (Hadiwijoyo, 2012:83) hubungan masyarakat dengan negara, *civil society* dianggap mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: **pertama**, *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. **Kedua**, *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan

negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. **Ketiga**, *civil society* sebagai kekuatan tandingan negara (*counter balancing the state atau counter veilling forces*).

b. Hubungan NGO dengan Pemerintah

NGO dan pemerintah bukan hanya sekedar sebagai organisasi yang melaksanakan sesuatu fungsi, tetapi juga sebagai organisasi manusia yang didalam dirinya sendiri mempunyai identitas, tujuan, dan terutama sekali mempunyai sejarah sosial sendiri-sendiri. Bahkan masing-masing juga mengembangkan cara pandang mereka sendiri tentang dunia sekelilingnya, serta peran yang harus mereka mainkan dalam pembangunan. Oleh karena itu ketika kedua pihak harus berinteraksi, problem kekuasaan akan selalu muncul dan mempengaruhi sifat dan dinamika hubungan mereka.

Penjelasan mengenai hubungan LSM atau NGO (*Non-Government Organisation*) dengan pemerintah menurut Eldridge (Suharko, 2005:16), menunjukkan bahwa posisi dan sikap LSM atau NGO terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas LSM atau NGO. Dengan mempertimbangkan variabel tersebut dan dengan berdasar pada cara LSM atau NGO berhubungan dengan pemerintah dan dengan masyarakat yang dilayaninya, Eldrige (Suharko, 2005:16) mengelompokan LSM atau NGO di Indonesia menjadi 4 (Empat) kategori.

Kategori yang pertama adalah LSM atau NGO menekankan pada penyediaan pelayanan pada masyarakat lapisan paling bawah (*grass-roots*)

dengan menggunakan pendekatan “*high-level cooperation-grassroots development*” (kerjasama tingkat tinggi-pembangunan masyarakat bawah). Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan dengan agen pemerintah yang berwenang tanpa disertai minat untuk mengubah dan mencampuri proses politik.

Kategori yang kedua adalah LSM atau NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu seperti lingkungan, gender, hak konsumen, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. LSM atau NGO seperti ini menerapkan pendekatan “*high-level politics – grassroots mobilization*” (politik tingkat tinggi-mobilisasi masyarakat bawah). LSM atau NGO ini aktif dalam melakukan upaya advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan, baik ditingkat local maupun tingkat Nasional. Perhatian utamanya adalah mereformasi kebijakan pemerintah.

Kategori yang ketiga adalah NGO yang menggunakan pendekatan “*empowerment from below*” (pemberdayaan dari bawah). Tipe LSM atau NGO ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya mengubah kebijakan. LSM atau NGO dalam kategori ketiga ini menggunakan hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah.

Kategori yang keempat adalah “NGO radikal” (*radical NGO*) yang kritis terhadap pemerintah, dan menempatkan diri sebagai “oposisi” terhadap pemerintah.

Eldidge (Suharko, 2005:19) mencatat bahwa kendati banyak NGO di Indonesia mempunyai pendekatan yang berbeda-beda terhadap pemerintah, namun pada titik-titik tertentu mereka mencapai titik temu. Titik temu tersebut adalah dalam hal orientasi penguatan kelompok masyarakat yang kuat serta sebagai kekuatan tandingan bagi kekuasaan pemerintah. Titik temu yang lain adalah pada pencarian kreatif strategi baru untuk menghadapi perubahan kebutuhan sosial maupun kemunculan struktur yang merugikan sehingga menyebabkan ketidak berdayaan. Disamping itu, komitmen kuat pada cita-cita partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan program juga menjadi titik temu dari beberapa NGO di Indonesia.

Pemerintah dapat berinteraksi dan memberi respon kepada aktivitas NGO melalui berbagai cara, mulai dari cara kooperatif sampai cara kontrol dengan derajat yang bervariasi. Sikap dan kebijakan pemerintah terhadap NGO dapat dilihat dari cara pemerintah menanggapi inisiatif NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:44), dengan memeriksa bekerjanya tiga dimensi strategis, yakni dimensi finansial, organisasional dan otonomi kebijakan versus kontrol, ditemukan lima model utama hubungan NGO-Pemerintah di sepanjang kontinum ruang politik.

- Otonomi/ *Benign Neglect* (Pengabaian yang Baik)

Dalam model ini, pemerintah menganggap inisiatif NGO tidak berbahaya dan membiarkan NGO beroperasi sebagai aktor otonom di bidang keuangan, kebijakan dan organisasional. Dalam beberapa kasus,

pemerintah mungkin menempuh “kebijakan lepas-tangan” terhadap aktivitas NGO. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menyatakan bahwa pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, banyak pemerintah yang cenderung mengabaikan eksistensi NGO. Akan tetapi ketika NGO bertambah banyak dan menjadi lebih aktif secara politik, pemerintah tidak lagi mengabaikan mereka.

Dalam kasus lainnya, pemerintah mengambil keuntungan dari NGO tetapi tidak selalu mengontrolnya, malahan belajar dan mereka. Fisher (dalam Suharko, 2005:44) menemukan tiga alasan di balik kebijakan itu, yaitu kurangnya kemampuan keuangan pemerintah, kebutuhan untuk memperkuat legitimasi pemerintah, serta tujuan keamanan dan militer.

- Fasilitasi / Promosi

Pada model ini, peran NGO dilihat sebagai pelengkap bagi aktivitas pemerintah, kemudian pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang memberdayakan. Pemerintah bisa memfasilitasi inisiatif NGO melalui dukungan finansial, pengakuan resmi atas aktivitas NGO (misalnya berupa status hukum), pemberlakuan kebijakan yang mendukung dan koordinasi informal dengan aktivitas NGO (misalnya untuk menghindari duplikasi).

- Kolaborasi / Kerja Sama

Dalam model ini, pemerintah merasa mendapat keuntungan bila melibatkan NGO secara langsung. Kekuatan setiap agen dapat diarahkan menuju upaya pembangunan bersama. Kemitraan NGO-Pemerintah, yang

juga melibatkan donor asing, didasarkan pada model interaksi ini. NGO dan Pemerintah bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan otonom, yang sifatnya bisa sementara atau berdasarkan basis yang sistematis.

Bentuk kerja sama adhoc sering diawali oleh NGO, meskipun dalam beberapa kasus departemen atau agen pemerintahlah yang lebih dahulu mempromosikan kerja sama tersebut. Akan tetapi menurut Sandberg (dalam Suharko, 2005:45), kebijakan sistematis yang mendukung kerja sama dengan NGO masih jarang terjadi. Lima model ideal dari pola organisasional kerja sama NGO-Pemerintah: pertemuan terjadwal secara teratur namun tidak dilembagakan secara formal, satu kantor di pihak negara, pengkoordinasian hubungan NGO-Negara di masing-masing kementerian, koordinasi di tingkat pemerintah lokal dan terdesentralisasi, dan pengaturan institusional multifokus dan berjenjang untuk hubungan NGO-Negara.

- Kooptasi

Kooptasi adalah bagian dari kontrol pemerintah atas komunitas NGO, dan biasanya dilakukan oleh suatu negara agen pengawasan. Dalam konteks ini, NGO menjadi subjek dari berbagai regulasi pemerintah di mana aspek finansial, organisasional dan kebijakan selalu di kontrol pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah bahkan membentuk NGO sendiri, yakni melalui pembentukan GONGOs (*Government-organized NGOs*) atau QUANGOs (*Quasi-non-governmental organizations*). Pemerintah juga

dapat membentuk organisasi payung yang dibentuk NGO, atau dapat mengkooptasi organisasi payung yang dibentuk NGO sendiri. Tetapi harus dicatat bahwa sifat dan derajat kooptasi dapat bervariasi, tergantung pada tindakan pemerintah dalam mengatur aktivitas NGO.

- Pembubaran

Jika NGO dianggap sebagai ancaman politik terhadap otoritasnya, pemerintah akan membatasi dan menghancurkan setiap inisiatif NGO. Menurut Bratton (dalam Suharko, 2005:47), Pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk represi untuk menindas kebebasan NGO dalam bertindak, seperti membatasi aktivitas NGO tertentu yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, melakukan reorganisasi atas struktur manajemen internal NGO, dan tindakan-tindakan keras terhadap aktivitas NGO seperti penculikan, teror, dan memenjarakan aktivis. Langkah paling keras adalah pembubaran paksa suatu NGO. Akan tetapi, penolakan terhadap aktivitas NGO tidak selalu merupakan kebijakan pemerintah. Tindakan itu seringkali hanya dilakukan oleh lembaga atau departemen pemerintah tertentu.

c. Ruang Politik Untuk Hubungan NGO-Pemerintah

Menurut Ricker dalam (Suharko, 2005:35), ruang politik (*political space*) tersebut merupakan lingkungan yang sensitif dan terus berubah dimana di dalamnya para aktor harus berjuang untuk meraih tujuan dan membangun visi mereka tentang pembangunan. Secara konseptual, ruang politik mengacu

pada arena dimana aktor-aktor non-pemerintah bisa melaksanakan inisiatifnya secara independen kepada pemerintah.

Ruang politik merupakan keseimbangan dinamis yang terus berubah di antara dua atau lebih aktor. Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGO-pemerintah. NGO dan masyarakat sipil lainnya berusaha memperluas ruang politik agar mereka dapat berorganisasi, beroperasi secara bebas, dan meningkatkan partisipasi politik mereka.

NGO dapat mempengaruhi ruang politik tersebut dengan membawa isu-isu penting kepada publik, mendukung kebijakan atau prioritas pelaksanaan pembangunan tertentu, dan lain-lain. Di pihak lain, pihak pemerintah berusaha untuk memperkecil ruang politik para aktor non-pemerintah melalui pembatasan dan kooptasi terhadap aktivitas yang berlangsung diluar kontrol pemerintah.

Pada tingkat praktis, ada beberapa dimensi kunci yang ikut menyumbang terbentuknya ruang politik antara pemerintah dan NGO. Riker dalam (Suharko, 2005:36) menunjukkan empat dimensi paling utama yang cukup berguna untuk menganalisa hubungan NGO-pemerintah yakni: dimensi orientasi dan ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan. Masing-masing dimensi merupakan sumber ketegangan dinamis antara NGO-Pemerintah, karena masing-masing pihak umumnya berusaha mengejar tujuan masing-masing.

Tabel berikut memaparkan empat dimensi orientasi yang dapat menjadi faktor penentu pola hubungan politik antara NGO dengan pemerintah/negara, dan strategi NGO dalam masing-masing dimensi tersebut, serta posisi pemerintah ketika berhadapan dengan NGO (Gaffar, 2006: 216).

Tabel 2.1
Dimensi Hubungan Politik NGO dan Pemerintah

Dimensi Ruang Politik	Strategi NGO vis-avis Pemerintah/Negara	Strategi Pemerintah/Negara vis-avis NGO
Orientasi isu	Mempengaruhi agenda pembangunan, mengeritik dan mengajukan alternatif kebijakan	Menetapkan agenda dan prioritas pembangunan, dan memonitor alternatif apa yang dapat diterima
Finansial	Memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah	Membantu sumber keuangan NGO, mengatur dan menyetujui penggunaannya untuk pembangunan
Organisasional	Menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan	Membantu proses administrasi NGO, untuk mengatur kegiatan mereka dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan
Kebijakan	Mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan	Membantu kebijakan, dialog, mengatur akses ke pembuatan keputusan, dan memelihara kontrol atas lingkungan pembuatan kebijakan.

Sumber: Gaffar (2006: 216)

Tabel diatas menggambarkan tentang empat dimensi yang dapat mempengaruhi hubungan politik *civil society* dengan pemerintah. Dimensi orientasi isu diartikan NGO mempengaruhi agenda pembangunan, mengeritik

dan mengajukan alternatif kebijakan. Dimensi finansial menjelaskan tentang langkah-langkah NGO dalam memobilisasi dukungan dana, sehingga menjadi mandiri dan terlepas dari campur tangan dan pengawasan pemerintah.

Dimensi kebijakan artinya dalam melaksanakan peran sebagai agen penyeimbang kekuasaan pemerintahan NGO senantiasa mempengaruhi dialog dalam pembentukan kebijakan dengan melakukan advokasi, guna meningkatkan kualitas lingkungan pembuatan kebijakan. Sementara pada dimensi organisasional NGO berupaya menjaga kemandirian, menghindari campur tangan pemerintah dalam urusan administrasi, pembuatan keputusan, dan pelaksanaan di lapangan.

3. Gerakan Sosial Baru

Gerakan Sosial, yakni perspektif *Gerakan Sosial Baru* muncul sekitar era tahun 1960-an dan 1970-an terutama di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika (Singh, 2010:96). Masyarakat Eropa dan Amerika saat itu menyaksikan munculnya gerakan skala besar sekitar isu-isu yang mendasarkan ada aspek humanis (*humanist*), kultural (*cultural*), dan non-materialistik (*non-materialistic*). Tujuan-tujuan dan nilai-nilai dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan model Gerakan Sosial Lama (*Klasik dan Neo-Klasik*), maka model Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tidak terjebak ke dalam diskursus ideologi yang mempertanyakan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas.

Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru tidak tertarik dengan ide revolusi termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan. Namun demikian, strategi dan tujuan dari Gerakan sosial Baru memiliki sedikit kesamaan dengan model Gerakan Sosial Lama, yaitu dalam memperjuangkan isu-isu seperti peningkatan buruh industri, menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas (Singh, 2010:121-122).

Pada dasarnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tidak tertarik untuk mempertanyakan ide revolusi. Paradigma ideologi dan orientasi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) lebih menonjolkan pluralitas, yang ditunjukkan secara beragam melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kebebasan sipil dan perdamaian (Singh, 2007:122).

Dalam Haryanto, (van Klinken, 2007: 11) mendefinisikan dengan komprehensif bahwa gerakan sosial sebagai: "...kolektivitas-kolektivitas yang dengan organisasi dan kontinuitas tertentu bertindak di luar saluran-saluran institusional atau organisasional dengan tujuan menggugat atau mempertahankan otoritas, entah yang didasarkan secara institusional atau kultural dan berlaku dalam kelompok, organisasi, masyarakat, kebudayaan atau tatanan dunia di mana mereka merupakan salah satu bagiannya."

Konseptualisasi ini melibatkan lima hal agar bisa dianggap sebagai gerakan sosial. Kelima konsep itu adalah tindakan kolektif atau gabungan, tujuan-tujuan atau klaim-klaim yang berorientasi pada perubahan, sesuatu tindakan

kolektif yang bersifat ekstra-institusional atau non-institusional, organisasi sampai tingkat tertentu (relasi), dan keberlanjutan dalam hal waktu sampai tingkat tertentu.

Studi tentang gerakan sosial adalah salah satu dari bagian terbesar dan paling luas dipahami dalam disiplin ilmu sosiologi. Beberapa peneliti mempelajari bangkitnya organisasi gerakan sosial yang lebih spesifik pada titik-titik tertentu dalam sejarah, sementara peneliti lain melihat pada tren dan peristiwa pada tingkat makro dalam upaya untuk menghubungkan berbagai macam demografis dalam skala besar, transformasi ekonomi dan politik terhadap munculnya secara regional, nasional, dan bahkan global dari sebuah gerakan sosial.

Adapun ciri-ciri dari Gerakan Sosial Baru yaitu :

Pertama, Gerakan Sosial Baru membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ komunitas dan masyarakat guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara agen-agen pengawasan dan kontrol sosial. Perlu disadari bahwa gerakan sosial baru bukanlah demi anarki, ia menyerukan sebuah kondisi sosial yang adil dan bermartabat bagi konsepsi kelahiran, kedewasaan, dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan bersinergi dengan alam.

Kedua, secara radikal Gerakan Sosial Baru mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas.

Ketiga, mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun penopang aksi kolektif, Gerakan Sosial Baru pada umumnya

mengabaikan model organisasi serikat buruh industri dan model politik kepartaian.

Keempat, struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan sebagai pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi dan oleh heterogenitas basis sosial mereka.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan dimasa lalu dan menjadi referensi dalam menganalisis dan mengkaji penelitian yang fokus kajiannya hampir sama dengan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) penelitian dahulu yang akan dijadikan referensi, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Debby Muslihat yang berjudul “*Peran Komunitas AIDS Plus Support Sebagai Aktor Intermediary Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS Di Kota Tasikmalaya*”. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Kasus ini terjadi karena kurangnya informasi serta kurangnya perhatian dari pemerintah dalam hal pencegahan, sehingga dari permasalahan ini muncul komunitas *aids plus support* yang menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu komunitas *plus support* mempunyai peran sebagai aktor *intermediary*.

Penelitian ini menggunakan teori *Intermediary Ways* dan Aktor *Intermediary*, penelitian ini juga menggunakan studi kasus yaitu mengumpulkan data secara komprehensif. Hasil dari penelitian ini adalah Kota Tasikmalaya belum bebas dari ancaman HIV/AIDS maka komunitas plus support akan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Meski pada kenyataannya sulit karena faktor pemerintah yang kurang perhatian dan sikap masyarakat yang acuh terhadap HIV/AIDS.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Laelatus Syarifah yang berjudul "*Peran Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdhatul Ulama Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak-anak Penyandang Disabilitas Di Kota Tasikmalaya*". Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Penelitian ini menjelaskan tentang keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya sebagai LSM atau NGO menjalankan fungsinya sebagai bagian dari *civil society*. LAKPESDAM NU berperan dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya. Peranan LSM tersebut digolongkan menjadi dua bidang, yaitu bidang dalam politik dan non-politik.

Peran dalam bidang politik yaitu salah satunya sebagai *intermediary* (penghubung) antara masyarakat dengan Negara, sedangkan dalam non-politik yaitu melakukan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dalam

bidang sosial-ekonomi. Peranan dalam bidang non-politik yang dilakukan oleh LAKPESDAM NU dimulai dengan melakukan riset dan pengkajian isu-isu sosial hingga akhirnya memutuskan untuk *concern* terhadap pemenuhan hak-hak anak disabilitas. Upaya selanjutnya yaitu membuat program layanan terapi gratis, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan membentuk RBM (Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat) ditingkat kelurahan dan kecamatan dikota Tasikmalaya, hingga melakukan hubungan dengan NGO lain, yaitu *Save The Childern*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Civil Society* dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / *Non Government Organizations* (NGO).

Tabel 2.2
Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
<p><i>Peran Komunitas AIDS Plus Support Sebagai Aktor Intermediary Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS Di Kota Tasikmalaya</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kualitatif • Pendekatan Studi Kasus • Fokus Kajian: <i>Intermediary Ways</i> 	<p>Fokus Penelitian: Peran Komunitas AIDS Support pada pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam upaya penurunan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya</p>	<p>Fokus Penelitian: LBH Ansor sebagai Aktor Intermediary dalam memperjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya</p>

<p><i>Peran Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdhatul Ulama Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak-anak Penyandang Disabilitas Di Kota Tasikmalaya</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kualitatif • Pendekatan Studi Kasus • Fokus Kajian: <i>Civil society</i> 	<p>Fokus Penelitian: Peran LAKPESDAM NU dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak-anak penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya</p>	<p>Fokus Penelitian: LBH Ansor sebagai Aktor Intermediary dalam memperjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Tenaga Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya</p>
--	--	--	--

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan penulis jadikan referensi dalam melakukan penelitian tentang *civil society* yang menjadi wadah sebagai aktor *intermediary* (penghubung) antara masyarakat dan pemerintah, khususnya tentang Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai Aktor *Intermediary* dalam memperjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

Pada dasarnya, penelitian terdahulu diatas memiliki beberapa perbedaan satu sama lain, mulai dari subjek penelitian hingga pendekatan penelitian yang digunakan. Namun disisi lain, penelitian-penelitian tersebut memiliki urgensi yang sama, yaitu mengenai *civil society* sebagai wadah aktor *intermediary* (penghubung) antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, namun penelitian ini lebih fokus kepada Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai Aktor

Intermediary dalam Memperjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

C. Kerangka Pemikiran

Guru Honorer dan tenaga kependidikan merupakan salah satu tenaga kerja dalam pendidikan yang masih mempunyai suatu permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya masih belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah, salah satunya dalam hal kesejahteraan upah atau gaji. *Civil Society* sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik perlu turun tangan sebagai aktor *intermediary* (penghubung), dan sebagai bagian dari masyarakat yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari *civil society* yang bergerak di bidang hukum yang bertujuan untuk memberikan suatu layanan bantuan hukum kepada rakyat miskin atau kurang mampu, buta hukum dan tertindas khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu juga LBH Ansor saat sedang mengupayakan dan memperjuangkan kesejahteraan untuk para guru honorer dan tenaga kependidikan demi mendorong terwujudnya peraturan daerah mengenai kesejahteraan guru honorer. Sehingga pihak LBH Ansor dan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan kesepakatan MoU terkait pengawalan kesejahteraan dan pendampingan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori aktor intermediary, karena pada dasarnya teori ini memiliki korelasi dengan judul penelitian dan akan dijadikan sebagai alat analisis. Penelitian ini lebih melihat kepada Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai bagian dari *civil society* yang menjadi aktor *intermediary*.

Pola hubungan ini hampir sama dengan konsep *good Governance*. Dalam konsep *good Governance*, ada tiga pilar kekuasaan yaitu Negara, Pasar, dan *Civil Society*. Guna mewujudkan *good Governance*, harus terciptanya sinergi bersama dari masing-masing aktor melalui kerja sama, tanggung jawab dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

